
ANALISA KERJASAMA INDONESIA DENGAN ASIA PASIFIC ECONOMIC COORPERATION (APEC) DALAM BIDANG KEIMIGRASIAN

Oleh

Alief Heidar Sardjono¹⁾, Dara Gautama Meilina²⁾, Kevin Figo Saragih³⁾ & Lintar Pujo Prasetyo⁴⁾^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik ImigrasiEmail: ¹aliefheidar@gmail.com, ²daragutama29@gmail.com, ³lintarpujoprasetyo@gmail.com & ⁴kevinfigo24@gmail.com**Abstrak**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran yang aktif dalam perancangan APEC maupun pengembangan kerjasamanya. Partisipasi yang dikerahkan Indonesia dalam APEC dipacu oleh kepentingan Indonesia guna memperkirakan dan mempersiapkan diri dalam menyongsong adanya perdagangan dunia yang bebas sekaligus mengamankan kepentingan negara. Dalam melakukan kerjasama ini, Indonesia juga melibatkan bidang-bidang lainnya seperti keimigrasian. Hasil dari kerjasama Indonesia dengan organisasi APEC dalam bidang keimigrasian adalah adanya ABTC (*APEC Business Travel Card*) dengan tujuannya adalah untuk mempercepat proses keluar ataupun masuk ke suatu negara bagi pemiliknya, yaitu pelaku bisnis yang sangat memperhatikan waktu. Pebisnis tidak perlu lagi mengajukan permohonan visa ketika akan melakukan perjalanan ke negara-negara partisipan ABTC dan memperoleh fasilitas pelayanan dengan diciptakannya jalur khusus ketika memiliki ABTC. Dalam pengimplementasian hasil kerjasama Indonesia dengan APEC dalam bidang keimigrasian, Imigrasi Indonesia telah menyediakan layanan jalur khusus pengguna ABTC di beberapa Wilayah dan memberikan pelayanan untuk mendapatkan ABTC. Adanya kemudahan keluar masuk suatu Wilayah dalam hal bisnis, diharapkan imigrasi tetap melakukan pengawasan pada jalur tersebut dan prosedur pembuatan ABTC karena mengingat pada era saat ini banyak orang yang dapat melakukan pemasukan data identitas untuk mencapai kepentingan dirinya.

Kata Kunci: Kerjasama, Keimigrasian & ABTC**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan letak yang strategis karena diapit oleh 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta diantara 2 (dua) samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Letaknya yang strategis bukan berarti Indonesia dapat hidup mandiri sebagai sebuah negara, Indonesia juga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama merupakan wujud dari proses yang didalamnya mempunyai kegiatan yang digerakkan oleh kumpulan dari beberapa orang atau kelompok yang memiliki fungsi untuk mencapai tujuan bersama dengan cara saling membantu dan memahami terhadap kegiatan masing – masing. (Sahban 2018) Dengan pengertian yang ada,

kerjasama tidak hanya terjadi antar perorangan namun bisa juga antar kelompok fungsinya untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam kelompok menjadi suatu kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Hal ini akan menjadi suatu hal pendorong untuk mempunyai energi dan sinergitas bagi individu – individu yang tergabung dalam kerjasama. Ide – ide yang cemerlang akan hadir dengan adanya kerjasama. (Sahban 2018) yang dapat dikatakan kelompok dalam penjelasan tersebut adalah sebuah kumpulan individu - individu yang terhubung yang memiliki energi dan sinergitas guna mencapai kepentingan kelompok. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kelompok dalam hal ini adalah

berbentuk organisasi. Negara dapat dikatakan sebagai kelompok karena negara juga memiliki tatanan organisasi di dalamnya. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara lain memiliki tujuan untuk menutup kekurangan dan mendapatkan keuntungan dari Kerjasama yang dilakukan. Begitu juga negara lain yang bekerjasama dengan Indonesia. Sesuai dengan ruang lingkup dari kerjasama sebuah negara, apabila negara Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara lain berarti kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia adalah kerjasama Internasional. Hal ini dapat dikatakan sebagai kerjasama Internasional, karena hal tersebut menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 (dua) negara merdeka dan juga berdaulat dengan maksudnya yaitu untuk mencapai tujuan – tujuan yang sudah direncanakan. (Widiastuti and Taat 2012) Kerjasama Internasional yang dilakukan Indonesia tidak hanya dilakukan secara bilateral dimana kerjasamanya hanya dilakukan antara 2 (dua) negara saja, tapi juga secara multilateral dengan wujud kerjasama yang bisa dijalankan lebih dari 2 (dua) negara. (Wikipedia 2020) Indonesia menjalin kerjasama Internasional secara bilateral dengan berbagai negara seperti Australia, Tiongkok, Singapura, dan sebagainya, serta melakukan kerjasama Internasional secara multilateral dengan bergabung di beberapa organisasi regional, seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Associatio of Southeast Asian Nations (ASEAN), Global Counter – Terrorism Forum (GCTF), Nuclear Security Summit (NSS), Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), *International Atomic Energy Agency (IAEA)*, *World Trade Organization (WTO)*, G-20, MIKTA, *Gerakan Non – Blok (GNB)*, dan sebagainya. (Direktorat Jenderal Multilateral 2015). Dengan begitu, Indonesia telah melakukan kerjasama secara bilateral dan multilateral dalam berbagai bidang seperti

bidang keamanan, bidang politik, bidang ekonomi, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara berkembang tentu sangat membutuhkan bantuan dalam kebutuhan membangun sebuah negara. Karena hal tersebut, Indonesia akan memaksimalkan adanya kerjasama Internasional untuk mendapatkan keuntungan. Negara Indonesia cukup banyak diminati oleh negara - negara lain dalam melakukan kerjasama Internasional dalam bidang ekonomi. Salah satu kerjasama Indonesia di bidang ekonomi yaitu adanya kerjasama antara Indonesia bersama organisasi *Regional Asia – Pacific Economic Cooperation* yang selanjutnya disebut APEC. APEC merupakan suatu organisasi yang memiliki kerjasama ekonomi Internasional dengan bentuk kerjasama regional. Kerjasama regional adalah suatu wujud dari kerjasama bidang ekonomi yang beranggotakan dari beberapa negara dalam suatu kawasan atau daerah tertentu yang mempunyai maksud untuk menjamin kepentingan ekonomi negara – negara satu kawasan yang memiliki tujuan yang sama dalam bidang ekonomi. (Sattar 2017) kerjasama yang dilakukan negara Indonesia dengan organisasi APEC bertujuan untuk saling menguatkan ketergantungan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. (Danyathi and Widiatedja 2015) Dengan kata lain, tujuan APEC yaitu guna memperkokoh pertumbuhan ekonomi pada kawasannya juga melakukan pengembangan dan perencanaan kepentingan – kepentingan kawasannya. Dalam kerjasama ini, telah terdaftar 21 (dua puluh satu) negara sebagai anggota APEC. Negara-negara tersebut yaitu Brunei Darussalam, Kanada, Cihli, Indonesia, Vietnam, Amerika Serikat, Cina Taipei, Singapura, Federasi Rusia, Peru, Papua Nugini, Selandia Baru, Meksiko, Malaysia, Republik Korea, Jepang, Cina, Hong Kong, Republik Rakyat Cina. (Pusat Kajian APEC (ASC UI) 2012). Berdasarkan gagasan Perdana Menteri Australia Bob Hawke, APEC didirikan ada tahun 1989 dan Indonesia menjadi salah satu pionernya.

Kerjasama bilateral antara negara Indonesia dengan organisasi APEC memang menguntungkan. kerjasama ini akan meningkatkan pemberlakuan liberalisme perdagangan dan Investasi mulai pada 2010 untuk negara – negara maju dan pada 2020 untuk negara – negara berkembang. (Manan 2018). Salah satu contoh keuntungan dari kerjasama antara negara Indonesia dengan organisasi APEC yaitu pada saat adanya wabah *corona virus*. Sejak munculnya virus corona pada desember 2019 lalu dan menjadikannya wabah dunia, semua tatanan kehidupan di dunia mengalami perubahan termasuk di negara Indonesia yang waktu itu mulai terdeteksi adanya virus corona pada tanggal 2 maret 2020. (Detik News 2020) Pemerintah Indonesia mengalami perubahan tatanan pada semua bidang terutama dalam bidang ekonomi dan sosial karena adanya kebijakan “*social distancing*” yang menyebabkan konsumsi masyarakat menjadi turun drastis dan aktivitas ekonomi menjadi terganggu. Karena permasalahan ekonomi yang cukup lama, APEC mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi APEC guna membahas penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan. (Saputra 2020)

Negara Indonesia berperan sebagai organisasi dalam melakukan kerjasama multilateral dengan sebuah organisasi Internasional. Maksud dari Negara Indonesia berperan sebagai organisasi yaitu dimana setiap organisasi memiliki struktur organisasi dengan adanya ketua, sekretaris, dan bidang-bidang lainnya. sehingga dalam melakukan kerjasama Internasional secara multilateral antara negara Indonesia dengan organisasi regional APEC tidak hanya dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara, melainkan juga perlu kesepakatan bidang-bidang yang berkaitan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan. Salah satu bidang yang ikut serta dalam melakukan kesepakatan kerjasama regional antara negara Indonesia dengan organisasi APEC adalah bidang keimigrasian. Keimigrasian adalah hal ihwal perlintasan

masuk atau keluar orang yang terjadi di wilayah Indonesia dan juga pengawasan dalam rangka menjaga kokohnya kedaulatan negara. (Keimigrasian 2011) dengan pengertian tersebut, Kerjasama yang dilakukan negara Indonesia dengan organisasi regional APEC dimaksudkan agar diberikan kemudahan dalam bidang keimigrasian.

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dari kajian ini yaitu :

1. Apa saja hasil dari kerjasama antara negara Indonesia dengan organisasi APEC dalam bidang keimigrasian ?
2. Bagaimanakah implementasi pemerintah Indonesia dari hasil kerjasama antara negara Indonesia dengan APEC pada bidang keimigrasian ?

Kajian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apa saja hasil dari kerjasama antara negara Indonesia dengan APEC dalam bidang keimigrasian. Selain itu, kajian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari hasil kerjasama yang telah didapatkan dari kerjasama bilateral antara Indonesia dengan organisasi APEC.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini, metode penelitian yang dilakukan berupa :

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini berupa pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan ini diambil karena cenderung lebih fleksibel ketika menghadapi situasi yang berubah-ubah ketika pengerjaan kajian ini berlangsung.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian ini menggunakan metode pengumpulan data yang berupa studi pustaka dan studi penelaahan terhadap buku, literatur, dan laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam kajian ini.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah dalam kajian ini.

3. Teknik Analisa Data

Kajian ini dilihat sebagai penelitian deskriptif analitis dalam melakukan pengolahan data. Maka, dalam kajian ini mempergunakan model interaktif yang meliputi kegiatan penyaringan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan letak yang strategis karena keunikannya yang diapit 2 (dua) samudra dan 2 (dua) benua. Letaknya yang strategis bukan berarti Indonesia dapat berdiri tanpa bantuan untuk menjadi sebuah negara, Indonesia juga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama adalah suatu wujud dari proses yang dalamnya memiliki kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang atau kelompok yang diutamakan untuk meraih tujuan bersama yang telah direncanakan dengan saling membantu dan memahami dengan aktifitas masing-masing. (Sahban 2018) Dengan pengertian yang ada, kerjasama tidak hanya terjadi antar perorangan namun bisa juga antar kelompok yang fokus untuk menggapai tujuan bersama yang sudah direncanakan. Kerjasama dalam kelompok menjadi suatu keperluan dalam meraih keberhasilan kerja. Hal ini akan menjadi suatu hal pendorong agar dapat memiliki energi dan sinergitas terhadap individu yang tergabung dalam kerjasama kelompok. Ide – ide yang cemerlang akan muncul dengan adanya kerjasama yang baik. (Sahban 2018) Yang dapat dikatakan kelompok dalam penjelasan tersebut adalah sebuah kumpulan individu-individu yang terhubung yang memiliki kekuatan dan kekompakan guna mencapai kepentingan bersama. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kelompok dalam hal ini adalah berbentuk organisasi. Negara dapat

dikatakan sebagai kelompok karena negara juga memiliki tatanan organisasi di dalamnya. Kerjasama yang dilakukan negara Indonesia dengan negara lain bertujuan untuk menutupi kekurangan dan mendapatkan keuntungan dari Kerjasama yang dilakukan. Begitu juga negara lain yang bekerjasama dengan Indonesia. Sesuai dengan ruang lingkup dari kerjasama sebuah negara, apabila negara Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara lain berarti kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia adalah kerjasama Internasional. Hal ini dapat dikatakan sebagai kerjasama Internasional karena merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih negara merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (Widiastuti and Taat 2012) Kerjasama Internasional yang dilakukan Indonesia tidak hanya dilakukan secara bilateral dimana kerjasama yang dilakukan antar 2 (dua) negara saja, tapi juga secara multilateral yaitu bentuk kerjasama dilakukan Lebih dari 2 (dua) negara. (Wikipedia 2020) Indonesia menjalin kerjasama Internasional secara bilateral dengan berbagai negara seperti Australia, Tiongkok, Singapura, dan sebagainya, serta melakukan kerjasama Internasional secara multilateral dengan bergabung di beberapa organisasi regional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Global Counter-Terrorism Forum* (GCTF), *Nuclear Security Summit* (NSS), *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT), *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *World Trade Organization* (WTO), G-20, MIKTA, *Gerakan Non-Blok* (GNB), dan lainnya. (Direktorat Jenderal Multilateral 2015). Dengan begitu, Indonesia telah melakukan kerjasama secara bilateral dan multilateral dalam berbagai bidang seperti bidang keamanan, bidang politik, bidang ekonomi, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara berkembang tentu sangat membutuhkan bantuan dalam

kebutuhan membangun sebuah negara. Karena hal tersebut, Indonesia akan memaksimalkan adanya kerjasama Internasional untuk mendapatkan keuntungan. Indonesia menjadi negara yang mempunyai peran aktif dalam terciptanya APEC ataupun mengembangkan kerjasama diantara negara lainnya. ikutnya Indonesia dalam organisasi APEC sangat diselenggarakan oleh keperluan Indonesia untuk memperkirakan dan mempersiapkan potensi yang ada dalam menyongsong perdagangan dunia yang bebas serta tidak lupa untuk melakukan pengamanan kepentingan nasional. Andil Indonesia yang paling dikenal bagi organisasi APEC adalah disetujuinya ketentuan organisasi yang disebut juga dengan istilah 'Tujuan Bogor' (Bogor Goals). Maksud dari tujuan bogor ialah liberalisasi perdagangan dan investasi secara memadai pada 2010 untuk negara dengan perekonomian yang sudah maju dan negara berkembang pada 2020 dengan tujuan bidang ekonomi bis berkembang lebih baik. Ketentuan ini dijadikan dasar dalam segala bentuk gagasan untuk menggiatkan percepatan penghilangan biaya perdagangan maupun investasi antar anggota APEC. (ditpolkom.bappenas 2020) Indonesia cukup banyak diminati oleh negara - negara lain dalam melakukan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi. Salah satu kerjasama Indonesia di bidang ekonomi yaitu adanya kerjasama antara Indonesia dengan organisasi regional *Asia-Pacific Economic Cooperation* yang selanjutnya disebut APEC. APEC merupakan suatu organisasi yang memiliki kerjasama ekonomi Internasional dengan bentuk kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan suatu wujud dari kerjasama dibidang ekonomi dari beberapa negara kawasan ataupun daerah tertentu yang memiliki fungsi untuk menjamin keutamaan ekonomi negara yang berada pada satu kawasan yang memiliki tujuan yang sama dalam bidang ekonomi. (Sattar 2017) Kerjasama yang dilakukan negara Indonesia dengan organisasi APEC bertujuan untuk saling menguatkan

ketergantungan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. (Danyathi and Widiatedja 2015) Dengan kata lain, tujuan APEC yaitu memperkokoh pembangunan ekonomi di lingkup kawasannya juga melakukan inovasi dan melakukan perencanaan keinginan - keinginan Kawasan dalam konteks multilateral. Dalam kerjasama ini, telah terdaftar 21 (dua puluh satu) negara sebagai anggota APEC. Negara-negara tersebut yaitu Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Kanada, Cihli, Indonesia, Hong Kong, Cina Taipei, Repblik Rakyat Cina, Jepang, Federasi Rusia, Malaysia, Selandia Baru, Meksiko, Republik Korea, Papua Nugini, Peru, Republik Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. (Pusat Kajian APEC (ASC UI) 2012). Menurut pendapat dari Bob Hawke sebagai Perdana Menteri Australia, APEC didirikan ada tahun 1989 dan Indonesia menjadi salah satu pionernya. APEC mempunyai karakter yang berbeda dari beragam forum kerjasama ekonomi di Kawasan lainnya yaitu karakternya yang tidak mengikat (*non-binding*). Pelaksanaannya didasarkan pada kesukarelaan dari keputusan yang diperoleh secara konsensus dan komitmen (*voluntarism*). (ditpolkom.bappenas 2020)

Kerjasama multilateral antara negara Indonesia dengan organisasi APEC memang menguntungkan. kerjasama ini akan meningkatkan pemberlakuan liberalisme perdagangan dan investasi mulai pada 2010 terhadap negara maju dan pada 2020 terhadap negara berkembang. (Manan 2018). Salah satu contoh keuntungan dari kerjasama antara negara Indonesia dengan organisasi APEC yaitu pada saat adanya wabah *corona virus*. Sejak munculnya virus corona pada desember 2019 lalu dan menjadikannya wabah dunia, semua tatanan kehidupan di dunia mengalami perubahan termasuk di negara Indonesia yang waktu itu mulai terdeteksi adanya virus corona pada tanggal 2 maret 2020. (Detik News 2020) Pemerintah Indonesia mengalami perubahan tatanan pada semua bidang terutama dalam bidang ekonomi dan sosial karena adanya

kebijakan “*social distancing*” yang menyebabkan konsumsi masyarakat menjadi turun drastis dan aktivitas ekonomi menjadi tidak stabil. Karena permasalahan ekonomi yang cukup lama, APEC mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi APEC guna membahas penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan. (Saputra 2020)

Negara Indonesia berperan sebagai organisasi dalam melakukan kerjasama multilateral dengan sebuah organisasi internasional. Maksud dari Negara Indonesia berperan sebagai organisasi yaitu dimana setiap organisasi memiliki struktur organisasi dengan adanya ketua, sekretaris, dan bidang-bidang lainnya. sehingga dalam melakukan kerjasama Internasional secara multilateral antara negara Indonesia dengan organisasi regional APEC tidak hanya dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara, melainkan juga perlu kesepakatan bidang-bidang yang berkaitan dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan. Salah satu bidang yang ikut serta dalam melakukan kesepakatan kerjasama regional antara negara Indonesia dengan organisasi APEC adalah bidang keimigrasian. Pengertian dari keimigrasian adalah hal ihwal perlintasan keluar ataupun masuk orang yang berada di Wilayah Indonesia dan juga pengawasan yang dilakukan dengan tujuan menjaga tegaknya kedaulatan negara. (Keimigrasian 2011) dengan pengertian tersebut, Kerjasama yang dilakukan negara Indonesia dengan organisasi Regional APEC dimaksudkan agar diberikan kemudahan dalam bidang keimigrasian.

Hasil dari adanya kerjasama Internasional antara negara Indonesia dengan organisasi regional APEC yaitu (ditpolkom.bappenas 2020) :

1. APEC ialah forum yang fleksibel untuk membahas isu – isu ekonomi internasional, Sehingga Indonesia akan mendapatkan Informasi terbaru mengenai perkembangan ekonomi internasional.
2. APEC ialah perwujudan forum konsolidasi menuju era perdagangan

bebas dan sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral.

3. Peningkatan manusia dan peningkatan kapasitas atau dikenal dengan *Human and Capacity Building*. Indonesia dapat memanfaatkan proyek dari APEC untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan sumber daya manusia baik yang disponsori oleh anggota ekonomi tertentu maupun melalui skema APEC.
4. peningkatan potensi untuk ekonomi perdagangan dan investasi Indonesia. Pembentukan APEC telah memberikan manfaat terhadap Peningkatan arus barang, jasa maupun pertumbuhan ekonomi negara anggota APEC. Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan potensi bursa APEC bagi peningkatan ekspor maupun arus Investasi, khususnya karena mitra dagang utama Indonesia sebagian besar berasal dari kawasan i APEC.
5. Sebagai forum untuk bertukar pengalaman. Forum APEC yang pada umumnya berbentuk “*policy dialogue*” memiliki manfaat yang sangat besar terutama untuk menarik pelajaran dan pengalaman baik dan buruknya anggota APEC lainnya dalam hal pengambilan dan pembuatan kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi.
6. Merencanakan kepentingan-kepentingan Indonesia dalam konteks ekonomi internasional.
7. Merupakan salah satu forum yang memungkinkan Indonesia untuk merencanakan kepentingan-kepentingannya dan mengamankan posisinya dalam tata hubungan ekonomi Internasional yang bebas.

Selain itu, salah satu pilar APEC mengenai fasilitas perdagangan dan investasi secara langsung akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha di Indonesia yakni dengan adanya kemudahan arus barang dan jasa dari Indonesia ke anggota APEC lainnya.

Beberapa inisiatif APEC yang memberikan manfaat kepada dunia usaha di Indonesia antara lain melalui pelaksanaan APEC *Business Travel Card* (ABTC) serta penyederhanaan prosedur yang berhubungan dengan pabean. APEC *Business Travel Card* merupakan hasil dari kerjasama antara Indonesia dengan organisasi APEC dalam bidang keimigrasian. Meningkatnya kegiatan Perjalanan para pebisnis dalam bidang perdagangan dan investasi negara - negara anggota dengan mobilitas tinggi memerlukan efisiensi waktu dalam melakukan kegiatan tersebut oleh karenanya sangat membutuhkan kemudahan dalam proses Keimigrasian, berdasarkan pertimbangan tersebut timbul kesepakatan dan rekomendasi forum APEC untuk memberikan kemudahan kegiatan lalulintas keimigrasian bagi pebisnis negara-negara anggota APEC dalam Skema Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (APEC *Business Travel Card* atau ABTC) (Direktorat Jenderal Imigrasi 2017) APEC *Business Travel Card* yang selanjutnya dikenal dengan ABTC adalah Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) yang berlaku di negara - negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC sebanyak 19 (Sembilan belas) negara. Tujuannya adalah mempercepat keluar masuk ke sebuah negara bagi para pemegangnya, yakni para pelaku bisnis yang sangat mementingkan waktu karena ABTC pebisnis tidak perlu lagi mengajukan permohonan visa setiap kali ingin bepergian ke negara - negara partisipan ABTC serta mendapat fasilitas pelayanan di bandara dengan jalur khusus. (Kantor Wilayah DKI Jakarta KEMENKUMHAM 2017) Jalur khusus yang disediakan untuk pengguna ABTC di Wilayah Indonesia tidak tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun fasilitas jalur khusus pengguna ABTC di Indonesia tidak tersebar di semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Indonesia tercatat memiliki jalur khusus terbanyak daripada 18 negara lainnya. Jalur khusus tersebut yaitu :

1. Bandara Soekarno – Hatta , Jakarta;
2. Bandara Ngurah Rai, Bali;
3. Bandara Kualanamu, Medan;
4. Bandara Juanda, Surabaya; dan
5. Batam Center, Batam.

Pengguna ABTC bisa juga masuk ke Indonesia tanpa melalui jalur khusus yang berada pada (Direktorat Jenderal Imigrasi 2017) :

1. Bandar Udara
 - Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru;
 - Hang Nadim, Batam;
 - Minangkabau , Padang;
 - Sam RatuLangi, Manado;
 - Halim Perdanakusuma, Jakarta;
 - Adi Sucipto, Yogyakarta;
 - Selaparang, Mataram;
 - Sepinggan, Balikpapan;
 - Hasanuddin, Makassar;
 - EI Tari, Kupang
 - Adi Sumarmo, Surakarta
 - Ahmad Yani, Semarang
 - Husein Sastranegara, Bandung
2. Pelabuhan Laut
 - Batam : Sekupang, Batu Ampar, Nongsa, Marina, Teluk Senimba.
 - Medan : Belawan.
 - Tanjung Uban : Bandar Bintan Telani, Iagoi, Bandar Sri Udana Iobam.
 - Tanjung Pinang : Sri Bintan Pura.
 - Dumai : Yos Sudarso.

Imigrasi tidak hanya berperan dalam memberikan kemudahan perlintasan pengguna ABTC, namun juga mengurus pembuatan ABTC tersebut. Prosedur pembuatan ABTC yaitu (Kantor Wilayah DKI Jakarta KEMENKUMHAM 2017) :

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan ABTC.
2. Petugas menerima permohonan dan dilanjutkan ke Kepala Seksi untuk persetujuan.
3. Jika disetujui, proses selanjutnya adalah Cek CekaI. Apabila lolos dari daftar cekaI,

- pemohon diarahkan untuk melakukan pembayaran.
4. Pembayaran terverifikasi, mulai melakukan entry data dan menunggu persetujuan 18 (delapan belas) negara Lainnya. Dalam hal ini memerlukan waktu selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan.
 5. Jika disetujui oleh 18 (delapan belas) negara, mulai pencetakan dan menunggu kedatangan kartu hingga penyerahan kartu kepada pemohon. Dari proses pencetakan hingga pengiriman kartu kepada pemohon memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan.

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia akan memaksimalkan adanya kerjasama Internasional untuk mendapatkan keuntungan. Indonesia merupakan negara yang memiliki peran aktif dalam terciptanya maupun memberikan inovasi kerjasama APEC. Ikut serta dari Indonesia dalam organisasi APEC sangat didorong oleh kepentingan Indonesia untuk mempersiapkan diri guna menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus melakukan pengamanan kepentingan Indonesia. Hasil dari ikut serta Indonesia yang terbesar bagi APEC adalah disepakatinya kesepakatan organisasi yang dikenal juga sebagai 'Tujuan Bogor' (*Bogor Goals*) yaitu Liberalisasi perdagangan dan Investasi secara penuh pada 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan pada 2020 untuk ekonomi dapat lebih baik. Kesepakatan ini menjadi dasar dalam berbagai inisiatif untuk mendorong percepatan penghapusan biaya perdagangan maupun Investasi antar anggota APEC.

Selain itu, salah satu pilar APEC mengenai fasilitasi perdagangan dan investasi dengan cara langsung akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha di Indonesia yakni dengan adanya kemudahan arus barang dan jasa dari Indonesia ke anggota APEC lainnya. Beberapa gagasan APEC yang memberikan manfaat kepada dunia usaha di Indonesia antara lain melalui pelaksanaan

APEC *Business Travel Card* (ABTC) dan juga penyederhanaan prosedur yang berhubungan dengan pabean. APEC *Business Travel Card* merupakan hasil dari kerjasama antara Indonesia dengan organisasi APEC dalam bidang keimigrasian. Meningkatnya kegiatan perjalanan para pebisnis dalam bidang perdagangan dan Investasi negara – negara anggota APEC dengan mobilitas tinggal memerlukan efisiensi waktu dalam melakukan kegiatan tersebut oleh karenanya sangat membutuhkan kemudahan dalam proses keimigrasian, berdasarkan pertimbangan tersebut munculah kesepakatan dan rekomendasi forum APEC untuk memberikan kemudahan kegiatan lalu lintas keimigrasian bagi pebisnis negara – negara anggota APEC dalam Skema Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (*APEC Business Travel Card*). APEC *Business Travel Card* yang selanjutnya disingkat dan disebut dengan ABTC adalah Kartu Perjalanan Pebisnis yang berlaku di negara – negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC sebanyak 19 (Sembilan belas) negara anggota. Tujuannya adalah mempercepat proses keluar masuk ke sebuah negara bagi para pemegangnya, yakni para pelaku bisnis yang sangat mementingkan waktu, karena dengan ABTC pebisnis tidak perlu lagi mengajukan permohonan visa setiap kali ingin bepergian ke negara – negara partisipan ABTC serta mendapat fasilitas pelayanan di bandara dengan jalur khusus.

Pengimplementasian dari hasil kerjasama antara negara Indonesia dengan organisasi APEC dalam bidang keimigrasian yaitu dengan adanya *jalur khusus yang telah disiapkan oleh negara Indonesia dan pelayanan dalam pembuatan ABTC. Jalur khusus tersebut terietak pada:*

1. Bandara Soekarno – Hatta , Jakarta;
2. Bandara Ngurah Rai, Bali;
3. Bandara Kualanamu, Medan;
4. Bandara Juanda, Surabaya; dan
5. Batam Center, Batam.

Pebisnis pengguna ABTC bisa juga masuk ke Indonesia tanpa melalui jalur khusus yang berada pada :

1. Bandar Udara

- Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru;
- Hang Nadim, Batam;
- Minangkabau, Padang;
- Sam Ratulangi, Manado;
- Halim Perdanakusuma, Jakarta;
- Adi Sucipto, Yogyakarta;
- Selaparang, Mataram;
- Sepinggan, Balikpapan;
- Hasanuddin, Makassar;
- El Tari, Kupang
- Adi Sumarmo, Surakarta
- Ahmad Yani, Semarang
- Husein Sastranegara, Bandung

2. Pelabuhan Laut

- Batam : Sekupang, Batu Ampar, Nongsa, Marina, Teluk Senimba.
- Medan : Belawan.
- Tanjung Uban : Bandar Bintan Telani, Iagoi, Bandar Sri Udana Iobam.
- Tanjung Pinang : Sri Bintan Pura.
- Dumai : Yos Sudarso.

Prosedur pembuatan ABTC merupakan bukti adanya pengimplementasian. Posedur pembuatan ABTC yaitu (Kantor Wilayah DKI Jakarta KEMENKUMHAM 2017) :

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan ABTC.
2. Petugas menerima permohonan dan dilanjutkan ke Kepala Seksi untuk persetujuan.
3. Jika disetujui, proses selanjutnya adalah Cek Ceki. Apabila lolos dari daftar ceki, pemohon diarahkan untuk melakukan pembayaran.
4. Pembayaran terverifikasi, mulai melakukan entry data dan menunggu persetujuan 18 (delapan belas) negara lainnya. Dalam hal ini memerlukan waktu selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan.
5. Jika disetujui oleh 18 (delapan belas) negara, mulai pencetakan dan menunggu

kedatangan kartu hingga penyerahan kartu kepada pemohon. Dari proses pencetakan hingga pengiriman kartu kepada pemohon memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan.

Saran

Hasil dari kerjasama Internasional antara negara Indonesia dengan organisasi regional APEC dalam memberikan fasilitas kepada pebisnis untuk memanfaatkan waktunya sehingga diciptakan adanya jalur khusus memang sangat tepat karena mempertimbangkan efisiensi waktu. Dalam proses pembuatan ABTC juga sudah memiliki prosedur dan durasi penyelesaian yang jelas. Alangkah lebih baiknya tetap diterapkan pengawasan pada rute khusus yang disediakan, karena pada era sekarang ini banyak orang yang semakin pintar dalam melakukan manipulasi data seperti pemalsuan paspor, pemalsuan tanda masuk, dan lain sebagainya hanya untuk melakukan kepentingan dirinya.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada anggota kelompok atas kerjasama yang baik sehingga dapat tercipta kajian ini dengan baik dan tepat waktu. Terimakasih juga kami sampaikan kepada dosen mata kuliah Kerjasama Keimigrasian Seno Setyo Pujonggo, S.Sos., M.Si. karena telah memberikan tugas jurnal ini sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai kerjasama antara Indonesia dengan organisasi APEC dalam bidang keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Danyathi, Ayu Putu Laksmi, and Ign Parikesit Widiatedja. *SIGNIFIKANSI PERAN ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) BAGI PENGUATAN PENGATURAN PARIWISATA*. Denpasar: repositori.unud.ac.id, 2015.
- [2] Detik News. *detiknews.com*. April 26, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> (accessed Maret 25, 2021).

- [3] Direktorat Jenderal Imigrasi. Juni 2017. <https://www.imigrasi.go.id/info/abtc#:~:text=Saat%20ini%20APEC%20memiliki%2021,Kong%2C%20Jepang%20dan%20Korea%20selatan.> (accessed Maret 30, 2021).
- [4] Direktorat Jenderal Multilateral. "Laporan Kinerja 2015 Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." Jakarta, 2015.
- [5] ditpolkom.bappenas. 2020. <http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3%29%20Keannggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/5%29%20APEC/APEC.pdf> (accessed Maret 29, 2021).
- [6] Kantor Wilayah DKI Jakarta KEMENKUMHAM. April 12, 2017. <https://jakarta.kemerkumham.go.id/layanan-publik/layanan-keimigrasian/layanan-untuk-wni/apec-business-travel-card-abtc> (accessed Maret 30, 2021).
- [7] Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian." Jakarta, Mei 5, 2011.
- [8] Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- [9] Nugroho, Faozan Tri. *Pengertian Kerja Sama Internasional, Ketahui Tujuan, Manfaat, dan Bentuk-bentuknya*. November 2020, 30. <https://www.bola.com/ragam/read/4421319/pengertian-kerja-sama-internasional-ketahui-tujuan-manfaat-dan-bentuk-bentuknya#:~:text=Bola.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Kerja,tujuan%20bersama%20dan%20saling%20menguntungkan.&text=Pada%20umumnya%2C%20kerja%20sama%20in.>
- [10] Pusat Kajian APEC (ASC UI). *Pusat Riset UI*. 2012. http://pusatriset.ui.ac.id/pusatriset/?page_id=56 (accessed Maret 2021, 24).
- [11] Sahban, Muhammad Amsal. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Makassar: CV. SAH MEDIA, 2018.
- [12] Saputra, Muhammad Genantan. *Menlu Retno: Pertemuan APEC Bahas Kerja Sama Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi*. November 20, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/menlu-retno-pertemuan-apec-bahas-kerja-sama-penanganan-covid-19-pemulihan-ekonomi.html> (accessed Maret 25, 2021).
- [13] Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2017.
- [14] Widiastuti, Anik, and Wulandari Taat. "KERJASAMA INTERNASIONAL (Bahan Ajar Untuk Mata Kuliah Kerjasama Internasional)." *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2012: 26.
- [15] Wikipedia . *Hubungan Bilateral*. April 1, 2020. (accessed Maret 25, 2021).